

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Bupati Tolak Kompensasi KCIC Rp 16,5 Miliar
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Bandung Barat
Sumber / Hal	: Tribun Jabar / Hal.5
Edisi	: Kamis, 25 Oktober 2018

Bupati Tolak Kompensasi KCIC Rp 16,5 miliar

NGAMPRAH, TRIBUN - Bupati Bandung Barat Aa Umbara secara tegas menolak mentah-mentah kompensasi yang diberikan PT Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC) senilai Rp 16,5 miliar.

Aa mengakui jika kereta api cepat ini memang jadi proyek strategis nasional, tetapi selama ini ia tidak pernah diajak komunikasi oleh pemerintah, baik itu saat ia masih menjabat sebagai Ketua DPRD KBB hingga kini saat ia menjadi bupati.

"Dahulu ada *groundbreaking* KCIC, tapi kami saat masih di dewan (DPRD KBB) engga diundang. Lalu kemarin ada yang datang menghadap ke saya hanya

konsultannya saja. Konsultan bisa memutuskan apa?" katanya di Kantor Pemda KBB, Rabu (24/10).

Aa menegaskan ia bukan membangkang apa yang telah menjadi proyek nasional, melainkan menginginkan adanya itikad baik pemerintah pusat dan pihak KCIC untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah.

"Banyak dampak yang justru disebabkan adanya KCIC ini, mulai banyaknya tenaga asing yang menyingkirkan pekerja lokal, masyarakat yang rumahnya tergusur hingga akhirnya tak memiliki rumah lagi. Jadi engga ada untungnya buat KBB kereta

cepat ini dan kami sangat tidak perlu kereta cepat," ujarnya.

Aa Umbara menginginkan KCIC dalam memberikan *community development* (comdev) berupa pembangunan infrastruktur jalan, rumah sakit, masjid, dan sarana lainnya di wilayah KBB bagian selatan. Contohnya comdev infrastruktur senilai Rp 225 miliar yang pernah dilakukan PLN saat membangun PLTA Upper Cisokan di Rongga. "Proyek KCIC itu kan luasnya 2.800 hektare yang awalnya hanya 1.270 hektare, jadi ya nominal bantuan harus lebih banyak dong," ujarnya. (m nandri prilatama)